

"PROFESSIONALISME POLRI VS PENINGKATAN KUALITAS KEJAHATAN"

Oleh : Marulak Pardede, S.H. *)

Pengantar

Naskah/Artikel ini merupakan Summary dari Hasil Pengkajian dan Penelitian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan yang dilakukan secara mandiri, dalam rangka sumbangan pemikiran bagi Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional dalam PJPT II khususnya, dan Peningkatan Ilmu Pengetahuan pada Umumnya.

Mudah-mudahan naskah/artikel ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama, dan dapat dijadikan sebagai bahan pendukung bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bahan referensi bagi berbagai pihak yang mendalami permasalahan ini.

Masyarakat dan polisinya merupakan dua kategori yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataannya bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum terdepan yang berhubungan dengan masyarakat, sehingga polisi dianggap sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalau dibandingkan dengan aparat penegak hukum

lainnya seperti jaksa, pengacara dan hakim, tampaknya aparat kepolisian lebih populer di mata masyarakat.

Dalam kaitan ini wajar pula jika aparat kepolisian sering mendapat perhatian dan sorotan masyarakat. Khususnya terhadap sejumlah persoalan mendasar yang dapat dikatakan hingga sekarang belum terjawab dengan tuntas. Sudah sampai seberapa jauh misalnya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, (Kamtibmas) dapat menyentuh segenap lapisan kehidupan masyarakat secara lebih merata dan adil. Juga tentang ekses-ekses penggunaan kekerasan dalam pemeriksaan tersangka, serta praktek-praktek pungli yang dilakukan secara terselubung maupun terang-terangan oleh oknum-oknum aparat kepolisian.

Peran ganda kepolisian yang dalam satu segi bertindak sebagai petugas penegak hukum sekaligus sebagai petugas pemelihara ketertiban, sering dilihat dengan persepsi yang berbeda. Sebagai penegak hukum aparat kepolisian terikat dengan prosedur hukum. Sebaliknya selaku petugas pemelihara ketertiban polisi dituntut bertindak secara cepat yang belum tentu selalu sesuai prosedur hukum. Keluhan tidak cukupnya jumlah personil Kepolisian RI yang kini berjumlah sekitar 165 ribu orang yang di-

*) Penulis adalah Peneliti Hukum dan Sosial Kemasyarakatan pada Pusat Pembinaan Sistem dan Pranata Hukum Nasional, BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, DEP. KEHAKIMAN, JAKARTA

anggap tidak memadai untuk memelihara Kamtibmas dari 187 juta penduduk Indonesia, merupakan sebagian dari sekian banyak pertanyaan yang belum terjawab.

Dalam konteks itulah kita menugutip pesan-pesan Pangab antara lain ditekankan oleh Pangab bahwa dalam menerapkan norma dan peraturan perundang-undangan, perlu diperhatikan nilai-nilai serta perasaan-perasaan yang hidup di lingkungan masyarakat. Ditegaskan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang ingin diwujudkan adalah kondisi dimana masyarakat memiliki perasaan aman, tenteram dan damai lahir-batin. Bebas dari rasa takut atau khawatir terhadap gangguan, baik fisik maupun psikis sehingga kehidupan masyarakat akan berjalan dengan tertib dan teratur sesuai norma yang ditentukan dalam konstitusi kita, tegas Pangab. Sebagaimana dikedepankan oleh Pangab dalam pesannya itu, maka siskamling yang diorganisasi di lingkungan RT dan RW merupakan salah satu perwujudan sistem keamanan swakarsa di bidang kamtibmas untuk menumbuhkan daya tangkal dan perlawanan masyarakat dalam membina keamanan lingkungan.

Kapan citra dan wibawa jajaran Polri kita berubah menjadi lebih baik. Tidak mudah memang menjawab pertanyaan klasik ini. Persoalannya tidak sesederhana sebagaimana anggapan banyak pihak. Tidak sederhana, seperti kita membalikkan telapak tangan. Sebab memperbaiki citra dan wibawa Polri, tidak sama dengan

membangun sebuah rumah atau membuat kue. Dalam membangun citra dan wibawa Polri yang kita hadapi bukanlah benda mati, melainkan sekumpulan sosok manusia dengan seribu satu persoalan yang melekat di dalamnya.

Tugas yang diemban oleh Polri memang jauh lebih kompleks dibanding angkatan yang lain. Musuh yang dihadapi oleh Polri sangat transparan dan banyak ragam atau jenisnya. Musuh yang dihadapinya tidak selalu tampil dalam wujud bersenjata fisik, bahkan seringkali menjadi abstrak. Sebab, musuh itu terkadang tampil berupa penyimpangan watak seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Bahkan musuh yang paling pelik lagi kehadiran berbagai godaan yang sering menguji kejujuran dan iman kita sendiri dalam mengemban tugas sehari-hari sebagai abdi dan pengayom masyarakat. Membenahi Polri menjadi lebih rumit karena ia selama ini telah menjadi salah satu bagian terpenting dari mesin birokrasi kekuatan Hankam (pertahanan keamanan), ia harus menyatu bersama angkatan lain dalam konsep membangun strategi pertahanan keamanan yang handal menangkal musuh-musuh yang datang dari dalam maupun luar negeri karena itu upaya pembenahan dari dalam dirinya, Polri tak bisa lepas dengan disiplin komando yang telah digariskan Mabes (Markas Besar) ABRI. Menjadi sangat logis, kalau penampilan Polri selama ini fisik maupun sikap mentalnya juga mirip-mirip per

sonel dari ketiga angkatan lainnya.

Dilihat dari peran dan fungsinya sendiri, seperti juga di negara-negara lain yang telah maju, Polri lebih menampilkan dirinya sebagai abdi atau pelayan masyarakat. Kehadirannya bukan untuk menjadi angkatan perang (bersenjata) yang bertugas menjaga dan mengamankan negara dari serangan musuh dari luar maupun dari dalam negeri. Tapi, tugas pokok Polri yang harus dipikulnya yakni menjadi abdi dan pelayan masyarakat tadi. Ia harus mampu mengayomi masyarakat dari berbagai gangguan keamanan dan menjaganya agar setiap warga merasa hidup lebih aman, tenteram dan bahagia.

Dilihat dari tugas pokoknya itu, setiap personel Polri memang membutuhkan persyaratan bekal kemahiran dan keterampilan tugas-tugas menghadapi masyarakat dengan seribu satu persoalan yang menyertainya. Tentu sangat berbeda dengan jajaran angkatan yang lainnya, Polri di sini lebih banyak dihadapkan kepada masalah-masalah sosial ketimbang tugas-tugas kemiliteran. Karenanya, dalam menjalankan tugas-tugas mulianya itu, setiap personil Polri perlu dibekali kemampuan profesional menghadapi persoalan-persoalan yang senantiasa hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita yang majemuk.

Daya Tanggap Polisi Lamban

Peran polisi pada waktu belakangan ini digugat lagi. Banyak berita yang dilansir Mass Media tentang polisi, berita-berita tersebut jelas tidak enak

bagi polisi, karena yang dipaparkan lebih banyak menyangkut cacat-cacat polisi. Soal denda damai, paling banyak diungkapkan dan dikomentari. Juga tentang pelayanan polisi yang hambar itu sebabnya jika Guru Besar Hukum Undip Satjipto Rahardjo menilai Polri sekarang banyak terkena polusi. Bukan saja polusi fisik, seperti yang dihadapi Polantas, tetapi juga polusi sosial dan polusi mental. Agaknya ini bisa dikaitkan dengan apa yang pernah dikemukakan mantan Kapolri Jenderal Pol Moch. Sanoesi, bahwa setiap hari 131 anggota Polri ditahan di seluruh wilayah Indonesia, karena terlibat berbagai kasus kejahatan. Belum lagi apa yang dikatakan pengamat masalah sosial dari UI/kriminolog Mulyana W. Kusumah, Daya tanggap polisi terhadap masyarakat selalu lamban.

Berbagai gugatan terhadap polisi tersebut, mengundang perhatian khusus Pangab baru Jenderal TNI Edi Sudradjat. Selesai acara serah terima jabatan dengan Jendral TNI Try Sutrisno di Cilangkap, Jendral Edi mengatakan, untuk periode mendatang ini kepolisian akan diberi perhatian khusus. Terutama menyangkut kemampuan dan kemahiran profesionalisme Polri perlu ditingkatkan, sehingga ia akan tampil dengan citra seperti yang diharapkan masyarakat.

Dalam kaitan ini juga sebelumnya Guru Besar Hukum Pidana Unair Prof. JE Sahetapy mengusulkan, agar kepolisian diberi otonomi dan posisi yang lebih independen, agar ruang ge-

raknya lebih besar dalam menangani kejahatan yang semakin kompleks. Menanggapi masalah otonomi ini sementara pihak menafsirkan, agar Polri dipisahkan dari ABRI. Soalnya di luar negeri polisi memang berada di Kementerian Dalam Negeri. Tidak heran jika kemudian masalah ini mengundang pula tanggapan. Tidak urung beberapa anggota DPR ketika mengadakan Raker dengan Kapolri. Menyampaikan pertanyaan tentang masalah otonomi dan pemisahan ini. Padahal sebelumnya Mantan Kapolri Awaloeddin Djamin dan Mendagri Rudini sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud otonomi tersebut adalah menyangkut pelaksanaan tugasnya bukan harus dipisahkan dari ABRI. Hal yang sama juga dikatakan Koenarto di depan raker dengan DPR. Bahkan ia menegaskan, memisahkan Polri dari ABRI banyak ruginya.

Peningkatan Pesat Kejahatan Ekonomi

Polisi kini lebih repot lagi, karena kejahatan bank semakin canggih. Hanya melalui jalur-jalur komputer, tidak sedikit bank dirugikan. Selain itu ada juga aparat bank yang memainkan komputer, sehingga uang nasabah bisa pindah rekening. Belum lagi beredarnya bilyet atau check palsu. Karena itu kita tidak heran jika Banurusman memperkirakan, kejahatan ekonomi pada tahun 1993 ini akan meningkat pesat. Inilah beberapa misal dari kejahatan perkotaan yang statistiknyanya kian meningkat,

dihampir semua kota-kota besar di dunia, sebagai konsekuensi modernisasi dan globalisasi. Tentunya di kota-kota besar di Indonesia pun tidak luput dari ancaman tersebut..

Karena itu sungguh tepat apa yang dikatakan Presiden Soeharto ketika meresmikan pembukaan Seminar Internasional Kejahatan Perkotaan, bahwa kejahatan perkotaan itu merupakan ancaman terhadap masyarakat, peradaban dan kemanusiaan. Soalnya, kejahatan perkotaan itu, bukan saja berbau ekonomi, tetapi menyangkut kriminal, bahkan yang lebih berbahaya seperti disebut Presiden adalah narkoba dan kejahatan-kejahatan yang terorganisasi dengan rapi. Jenis-jenis kejahatan ini memang merupakan khas penyakit kota, namun bukan mustahil, jika penanggulangan dan pencegahannya tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sulit pula dicegah virusnya akan menjalar kepedesaan. Revolusi komunikasi yang begitu cepat, sehingga rakyat di desa-desa bahkan di tempat-tempat terpencil dengan sendirinya bisa belajar tentang berbagai jenis kejahatan perkotaan.

Seperti di negara-negara maju di Indonesia dewasa ini mulai dikenal jenis-jenis kejahatan perkotaan yang lebih sulit ditanggulangi. Jenis kejahatan itu diantaranya : seperti bank gelap, pencemaran lingkungan, pembajakan hak cipta dan hak milik intelektual lainnya, penyalahgunaan wewenang, penggelapan pajak,

pemutihan uang hasil kejahatan dan kejahatan menggunakan komputer. Kalau dilihat jenisnya tindak kejahatan seperti itu hanya dapat dilakukan oleh lapisan terpelajar dan profesional. Menurut Kepala Negara, beberapa kasus kejahatan perkotaan sudah pernah terjadi dinegara ini dan hukuman telah pula dijatuhkan terhadap para penjahatnya.

Kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan jenis ini biasanya cukup besar melibatkan negara dan kepentingan masyarakat luas. Sebabnya, para pelakunya sendiri terdiri dari para terpelajar dan terorganisir rapih. Karena itu yang menjadi obyek sasaran kejahatannya yakni sebagian-sebagian atau sektor kehidupan yang strategis, karena itu, dalam melancarkan operasinya, mereka juga menempuh cara-cara yang terorganisir rapih, disamping kemampuan membuat suatu perencanaan dan pengendalian yang serba canggih.

Dibeberapa negara maju para penjahat yang sudah terorganisir rapih itu secara berangsur berhasil menghimpun kekuatan sehingga mampu menentang kewibawaan pemerintah negara nasional itu sendiri. Salah satu bentuk kejahatan terorganisir rapih yakni kejahatan narkotika. Jenis kejahatan yang satu ini, seperti kita maklum tidak hanya berlangsung dalam suatu negara, melainkan sudah mempunyai jaringan internasional. Menurut Presiden jaringan kejahatan ini demikian besar, sehingga mempunyai kemampuan memaksakan ke-

hendaknya. Mereka mampu menggunakan kelemahan peraturan perundangan, kelemahan para penegak hukum dan kemiskinan masyarakat untuk membangun sesuatu kekuatan yang sangat besar.

Ketimpangan Profesionalisme

Salah satu aspek kejahatan yang akhir-akhir ini berkembang dalam masyarakat yang semakin modern adalah modus operandinya yang makin berkualitas dan makin canggih. Kita akhir-akhir ini banyak mendengar tentang white collar crime dalam bentuk tindak kejahatan pembobolan komputer, pemalsuan kartu kredit dan sebagainya. Gejala peningkatan kualitas kriminalitas yang terus berkembang, merupakan tantangan yang harus mampu dijawab tuntas, terutama dalam upaya penegakan hukum. Baik dari segi teknik penegakannya maupun dari segi kesiapan dan kelengkapan serta bobot peraturan perundang-undangan. Tentu masyarakat menaruh banyak harapan kepada aparatur kepolisian yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, karena kebutuhan dasar masyarakat akan keamanan dan ketertiban. Kenyataan yang tak terbantahkan memang bahwa masyarakat tak dapat membangun kehidupan sosialnya dengan baik apabila tidak terdapat keamanan dan ketertiban lingkungannya.

Suatu hal yang pasti, subur tidaknya kejahatan kota tidak bisa dilepaskan dari garis-garis besar teori P (Possibility model) dalam moderni-

sasi pembangunan. Di negara-negara maju sosiologi telah membebaskan diri dari reduksionisme, yang selama ini sering secara dogmatis mementingkan aspek psikologis atau aspek-aspek persial lainnya dari realisasi sosial. Sebagai implikasi lainnya tercatat berbagai kejahatan, karena hal itu berburu dengan terjadinya perubahan-perubahan. Meskipun kejahatan memang sudah ada ditengah-tengah masyarakat sepanjang jaman, bukan berarti kita lantas mengakui hal tersebut sebagai kenyataan yang tidak dapat diubah.

Karena perubahan adalah hal yang paling dominan dalam kehidupan modern, siapapun tentunya tidak bisa membantah, bahwa diadakannya Seminar Internasional Kejahatan Perkotaan di Indonesia, memperlihatkan lagi kepada dunia, betapa besar hasrat Indonesia untuk berperan aktif dalam menata kehidupan masyarakat planet bumi menuju ketentraman yang hakiki. Banyak harapan yang pantas dan diharapkan pada seminar ini, karena mencegah kejahatan perkotaan, jelas memiliki berbagai konsekuensi. Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia jelas belum memiliki berbagai perangkat modern untuk pencegahan kejahatan perkotaan, selain minimnya tenaga profesional dibidang ini. Disini terasa sekali betapa panasnya demam pembangunan, sehingga terjadi ketimpangan dibidang lain. Ketimpangan itu sangat terasa dalam kaitannya dengan profesionalisme pencegahan

kejahatan yang diatur oleh modernisasi.

Upaya Pencegahan

Di negara kita pada dasarnya sudah lama mengenal apa yang disebut sebagai kejahatan perkotaan. Dulu memang kita tidak menyebutnya sebagai kejahatan perkotaan melainkan dengan istilah kejahatan kerah putih atau berdasi. Penggunaan istilah ini hanya membedakan jenis kejahatan yang biasa dilakukan oleh para pelaku tindak kriminalitas konvensional seperti pembunuhan dan perampokan. Disebut kejahatan kerah putih, sebab para pelakunya terdiri dari orang pelajar dan biasa bekerja dibelakang meja dengan penampilan dan berpakaian selalu necis serta berdasi.

Jika dilihat para pelakunya, jenis kejahatan ini sejak dulu memang banyak beroperasi dikota-kota besar sebab segala aktivitas pembangunan perekonomian, moneter dan keuangan dikendalikan dari kota-kota besar. Dan orang-orang terpelajar, termasuk didalamnya para penjahat berdasi, selama ini memang banyak berkumpul di perkotaan. Hanya dengan kemampuan kecerdasan otak dan penanya, orang-orang berdasi itu secara mudah dapat meraup milyaran rupiah untuk kepentingan kelompoknya atau pribadi. Mungkin karena perkotaan menjadi basis aktivitas kejahatan mereka, menyebabkan jenis kejahatan ini mendapat predikat baru menjadi kejahatan perkotaan.

Namun terlepas apa pun yang menjadi predikatnya, tapi jenis keja-

hatan yang satu ini memang perlu segera mendapat perhatian yang lebih serius dari segenap jajaran instansi terkait. Sebab, kejahatan perkotaan mempunyai watak seperti diuraikan di atas bagaikan pembunuh berdarah dingin. Sikap dan tingkah lakunya sangat tenang simpatik dan terpelajar kalau berhadapan dengan mereka, pasti tidak akan menduga bahwa orang yang berdiri didepannya itu penjahat kaliber berat. Justru karena penampilan dan wataknya yang demikian tenang dan simpatik inilah, kita akan sangat mudah terkecoh.

Hal lain yang mendorong perlunya ditingkatkan kewaspadaan terhadap jenis kejahatan ini, karena frekuensi maupun kadar tindakan kejahatannya menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Demikian juga sistem jaringan organisasi mereka cara-cara kerja maupun peralatan yang digunakannya sudah sangat canggih mengikuti perkembangan kemajuan teknologi mutakhir. Karena itu, untuk mengantisipasi kita perlu harus lebih maju dan canggih dari mereka, baik dalam hal organisasi maupun penggunaan alat-alat teknologi penangkalnya. Termasuk didalamnya membuat perangkat perundangan dan segala aturan main serta lengkap dengan berbagai ancaman sanksi hukumannya. Tidak hanya sampai disini dalam berorganisasi menghadapi ancaman kejahatan itu juga perlu ditempuh dengan menempatkan orang-orang kuat dan bersih pada posisi-posisi strategis. Ini pen-

ting, selain untuk upaya pencegahan juga dimasukkan agar sistem pengawasan melekat dapat berjalan efektif. Dan tak kalah pentingnya lagi mekanisme pengawasan sosial juga perlu lebih dikembangkan agar masyarakat dapat berperan aktif untuk ikut memerangan ancaman bahaya kejahatan yang berdarah dingin itu.

Bahwa gugatan terhadap Polri begitu gencar, bisa dimengerti dan pihak kepolisian sendiri tentu menyadarinya lantaran sesuai modernisasi disemua sektor, tuntutan masyarakat hanya sederhana yakni ketentraman. Artinya dimata masyarakat sosok polisi ideal, bila ia mampu memenuhi semua harapannya. Dilihat dari jumlah personil Polri yang ada sekarang adalah 1 : 1.200 orang, jauh daripada memadai. Apalagi jika ingin berpegang pada ketentuan PBB yakni 1 polisi untuk 350 penduduk.

Belum lagi jika mau mengkaji gaji yang kecil tidak seimbang dengan beban tugasnya yang begitu berat, selain minimnya prasarana dan perlengkapan kepolisian, bahkan dana yang minim. Misalnya, sampai saat ini Polri belum memiliki Pusdik Reserse, padahal kualitas kejahatan semakin meningkat terkait dengan revolusi tehnologi dan komunikasi. Meskipun ada kondisi yang bisa memaafkan Polri seperti yang kita kemukakan diatas, namun bukan berarti Polisi kita lantas seenaknya saja bernaung dibawah tirai pemaafan itu. Rakyat akan terus menggugat polisi, polusi tak bosan menjebak polisi, apalagi ma-

asyarakat sendiri sebenarnya terkadang lupa, mereka jualah mendorong polisi bermental nakal. Citra dan profesionalisme Polri bisa ditingkatkan, jika pemerintah melakukan perhatian secara khusus, terutama dalam sarana, sementara masyarakat ikut membantu dan personil Polri sendiri tahu diri.

Dalam kaitan inilah, belum lama ini sempat timbul pemikiran sebaiknya Polri dilepaskan saja dari ABRI. Di negara-negara lain Polri memang tidak masuk dalam jajaran ABRI. Ada negara yang memasukkannya kedalam Departemen Dalam Negeri Di Negara kita juga dulu pernah Polri masuk dalam jajaran Depdagri. Tapi karena tuntutan jaman mengharuskan setiap warga yang bersenjata dimasukkan ke Departemen Hankam, maka Polri yang bersenjata juga harus masuk ke jajaran ABRI atau Hankam. Pertanyaannya kemudian, dapatkah Polri dilepaskan kembali dari ABRI? Pertanyaan Pangab baru Jendral TNI Edi Sudradjat, kiranya dapat menjernihkan masalah itu. Menurut Panglima ABRI, untuk periode mendatang Polri akan diberikan perhatian khusus. Dalam arti, masalah-masalah seperti kemampuan dan kemahiran profesional Polri perlu ditingkatkan, sehingga ia akan tampil dengan citra sebagaimana yang diharapkan seluruh masyarakat.

Dari pernyataan Edi Sudradjat ini, menjadi jelas bahwa Polri dimasa depan tetap berada didalam jajaran ABRI tapi, ditangan Pangab yang baru ini Polri akan memperoleh porsi

perhatian yang lebih istimewa atau khusus. Apa yang dimaksudkan khusus disini? Sayang Pangab tidak menjelaskan lebih rinci lagi kita semua berharap, tentunya perhatian yang akan diberikan secara khusus itu, bukan sekedar basa-basi. Tapi, memang benar-benar bahwa pimpinan ABRI akan lebih memprioritaskan membangun Polri yang tangguh dan menjadi idola masyarakatnya. Tugas dan tantangan negara dimasa damai, seperti Indonesia yang sedang giat membangun sekarang kehadiran Polri yang handal memang merupakan syarat mutlak. Ia bukan saja sangat peduli dengan lingkungannya, juga peka terhadap apa yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

Polri yang tangguh hanya terdiri dari personil kepolisian yang benar-benar selektif. Mereka hasil saringan dan gemblengan yang ketat sehingga dapat tampil menjadi polisi yang berwibawa dan disegani oleh masyarakat. Disegani dan berwibawa bukan karena menyandang senjata dengan penampilan yang lebih garang dan angker. Tapi Polri yang menjadi idola kita yakni polisi yang penuh simpatik, cerdas, jujur bijaksana dan akrab dengan rakyat. Profesionalisme Polri yang akan ditingkatkan dimasa depan, kita harapkan mengacu kepada tuntutan dan kepentingan jaman tersebut. Tidak hanya kuantitatif, tapi lebih penting lagi dan sangat mendesak peningkatan kualitatif personel Polri.

Semoga.

Daftar Kepustakaan

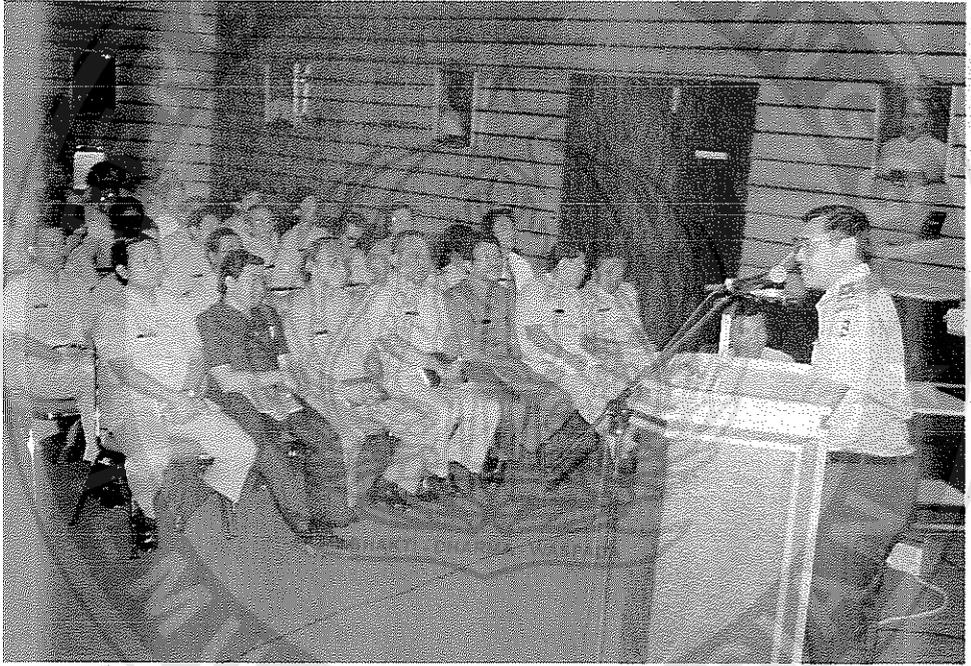
1. Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Penerbit : Bina Cipta, Jakarta, 1993.
2. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, 1993.
3. Saidman, Robert B, The State Law and Development, St Martin's Press INC, New York, 1978.
4. Djoko Sarwoko, Menyambut Hadirnya Crime Prevention Fund Foundation (CPFF), Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia. Varia Peradilan, Jakarta, 1992.
5. Marulak Pardede, Tendensi Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tindakan Pidana Perbankan, Penerbit : IKAHI, VARIA PERADILAN, Jakarta, 1992.
6. Johnson, Doyle Pul, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, di Indonesiakan Robert MZ Lawang, Penerbit : Gramedia, Jakarta, 1986.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

LINTASAN PERISTIWA



*Pernyataan kesiapan para pengemudi dalam pelaksanaan UULAJ
(UU No. 14 Th. 1992)*



*Pemasyarakatan UULAJ oleh Kadispen Polri di depan pejabat
Dep. Koperasi*